

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan tentang pentingnya Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan dan di bentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Prinsip masyarakat sipil yang mendasari studi ini pada dasarnya merupakan prinsip tentang masyarakat yang otonom, ialah sebagai komponen yang bisa mengajukan diri sendiri dapat “memilih” campur tangan pemerintahan dan negara dalam kenyataan yang di ciptakannya dengan sewaktu- waktu menunjukkan sikap kritis dalam urusan politik.¹

Peran penting masyarakat sipil dipercaya sebagai semacam kepentingan bahwa masyarakat sipil merupakan salah satu pemeran penting dalam perolehan pembangunan dan demokratisasi yang telah berlaku di Indonesia saat ini dan terus akan berlaku di masa mendatang. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dapat ditampakkan pada dua lapisan, yakni lapisan lokal maupun lapisan nasional. Pada kedua lapisan ini, aktor masyarakat sipil berperan penting dalam memperlebar ruang publik dimana sebagai kepentingan poin masyarakat berhadapan untuk memajukan kepentingan bersama.²

Pada lapisan lokal, masyarakat sipil sudah menunjukkan aktor pentingnya untuk memajukan demokrasi yang mempengaruhi kebijakan publik dan memajukan tata pemerintahan yang demokratis (TKLD). Keikut sertaan aktif masyarakat sipil terlihat dalam penyusunan dan penganggaran partisipatif; pemberdayaan warga; pelayanan publik; pendidikan Serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan pengawasan terhadap pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel.³

Pada lapisan ini Terlihat munculnya inisiatif masyarakat sipil untuk menumbuhkan beberapa forum lintas aktor. Masyarakat

¹ Hadi H. Otho. “ Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Domokratisasi.” Makara, Sosial Humaniora, Vol. 14, No. 2, Desember 2010: 117-129

² Baso, A. (1999). *Civil society versus masyarakat madani*. Jakarta: Pustaka Hidayah

³ Parera, F.M. & Utama, J. (1999). *Masyarakat versus Negara: Paradigma baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: Kompas

sipil aktif menularkan kebijakan publik, menumbuhkan akuntabilitas sektor negara dan pasar, dengan tindakan pemberdayaan warga. Meskipun negara mendapatkan ruang bagi masyarakat untuk mengikuti dalam pengelolaan tata pemerintahan, dan bagian pasar meninggalkan ruang bagi masyarakat untuk menumbuhkan taraf hidupnya Menuju pada pemberdayaan dan HAM. Secara operasional bentuk masyarakat sipil mencakup non pemerintah yang ada di masyarakat untuk mewujudkan organisasi, pengelompokan politik dan sosial berusaha untuk membentuk kemandirian, masyarakat sipil merupakan sebuah panggung di luar keluarga ataupun negara, yang mana orang-orang bisa berkumpul dan berkelompok nantinya bisa mendorong kepentingan bersama.⁴

Selanjutnya terbentuknya organisasi/ komunitas Disabilitas Blera Mustika (DBM) di harapkan bisa mewakili seluruh aspirasi para penyandang difabel. Di sisi lain dari para Disabilitas Blera Mustika dengan melakukan advokasi kepada pemerintah kabupaten Blera dimana dapat mendorong kebijakan serta progam berkelanjutan, serta membangun komunikasi yang baik kepada pemerintah Kabupaten Blera sebagai upaya untuk pemenuhan hak yang sama, kemudian melakukan advokasi untuk mendorong terwujudnya perda disabilitas yang ada di kabupaten Blera, serta pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas yang bisa menjadikan kemandirian ekonomi dan memberi motivasi hidup agar bisa menghilangkan stigma diri dan keluarga.⁵

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 11 menyatakan bahwa adanya hak penyandang disabilitas tidak di berhentikan karena alasan disabilitas. Oleh karena itu harus adanya ditindaklanjuti kembali kebijakan atau peraturan yang telah di terbitkan sebelumnya, tidak terjadi masalah dan polemik bagi penyandang disabilitas. Maka di perlukannya komunitas, yang bisa mawadahi dan merangkul penyandang difabel agar bisa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan dapat menuangkan aspirasinya dari persatuan komunitas, nantinya bisa menjadi pentingnya kebersamaan dalam memenuhi kehidupan sosial di dasarkan atas kesamaan ideologi, sosial dan ekonomi. Penyandang disabilitas adalah sebagian dari masyarakat Indonesia dimana mereka juga mempunyai kewajiban dan hak serta ikut dalam peran yang sama dengan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu harus

⁴ *Indonesia's New Order (1989-199)*. Disertasi Doktoral, University of Hawaii.

⁵ Sparingga, D.T. (1997). Hegemony and logic of the New Order, *Jurnal Dinamika*

adanya kebijakan pemerintah dalam kegiatan kehidupan di masyarakat.⁶

Selain itu secara fisik dalam satu tempat komunitas biasanya terikat dengan adanya batas geografis maupun lokasi dari masing-masing komunitas, oleh sebab itu memiliki mekanisme dan cara yang berbeda dalam menyikapi keterbatasan yang di hadapi mereka, kemudian bisa mengembangkan kekompakan, dengan berkomunikasi penyandang difabel di kota Blora yang sering di sebut dengan disabilitas Blora Mustika (DBM). Berdasarkan dari hasil penemuan penelitian dapat di lihat dari sudut pandang beberapa kajian terkait dengan permasalahan yang di alami oleh difabel di kabupaten Blora baik dari segi psikologi, sosial, maupun ekonomi. ⁷

Permasalahan di alami oleh difabel saat ini berdasarkan dari hasil penelitian terutama dari pendapat masyarakat, mengenai adanya para difabel yang masih di remehkan, masyarakat juga menjadikan keterbatasan fisik mereka sebagai tolak ukur dalam menilai kelemahan difabel sehingga bisa mengakibatkan banyak aktor yang tidak di percayakan kepada difabel. Jika di lihat dari segi ekonomi penyandang difabel yang ada di dunia pekerjaan sangatlah terbatas atau minim, dan pada akhirnya pemilik modal pun juga tidak andil dalam memberikan kesempatan untuk para difabel menjadi karyawan mereka dengan alasan keterbatasan dan kemampuan mereka tidak terpenuhinya standar.⁸

Kemudian dari segi kemiskinan menjadi penghambat para Disabilitas di kabupaten Blora, nantinya mendapatkan kehidupan yang tidak layak terutama dari segi perawatan medis mereka butuhkan. Serta dari fasilitas kesehatan yang di berikan untuk masyarakat difabel khususnya, nyatanya belum terjangkau oleh mereka dari segi harga karena perawatan bagi para difabel cukup menguras kantong mereka. Para difabel juga jarang mendapatkan adanya kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya dan pendapat yang bisa mempengaruhi dalam pembutaan kebijakan, partisipasi difabel masih terbilang sangat minim dari berbagai kegiatan langsung berhubungan dengan pemerintah. Kemudian masyarakat juga masih menjadikan para difabel sebagai objek atau sasaran

⁶ Jhon W, Creshevell, "Reseach Design", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Hal 56

⁷ Hikam, M.A.S. (1997). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

⁸ Wawancara dengan warga setempat, di Blora, 23 Oktober 2022, Pukul 14.10 WIB

penerima program dan belum dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksana teknis dalam hidup Meraka.⁹

Adapun sebuah pemberdayaan oleh komunitas difabel yang selama ini belum terlihat oleh pemerintah dan perlu adanya perhatian yang lebih karena mereka harus hidup secara mandiri dan tidak bisa mengandalkan orang lain baik dari pemerintah maupun organisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan dari fakta kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “**Strategi Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil DBM (Disabilitas Blora Mustika) dalam Memperjuangkan Perda Disabilitas Tahun 2018- 2019**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang di sadari pada penelitian yang menyeluruh, di bentuk oleh kata-kata dan di dapat dari situasi yang alamiah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk pertama, mengetahui dan mencari gambaran tentang karakteristik organisasi masyarakat sipil dan strategi Advokasi disabilitas Blora mustika dalam memperjuangkan perda disabilitas di kabupaten Blora, serta faktor pendukung dan hambatan yang di alami oleh para difabel dalam pengajuan perda disabilitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis merumuskan bahwa masalah pokok dari permasalahan yaitu:

1. Bagaimana karakteristik organisasi masyarakat sipil (OMS) tercermin dalam organisasi disabilitas Blora mustika (DBM)?
2. Bagaimana Strategi Advokasi Disabilitas Blora Mustika (DBM) dalam memperjuangkan Perda Disabilitas?
3. Bagaimana faktor Pendukung dan Penghambat DBM dalam Upaya Mewujudkan Perda Disabilitas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal yang berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut

⁹ Parera, F.M. & Utama, J. (1999). *Masyarakat versus Negara: Paradigma baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: Kompas

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang karakteristik organisasi masyarakat sipil untuk terwujudnya perda disabilitas di Kabupaten Blora.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat deskripsi mendalam strategi Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil untuk memperjuang hak-hak para penyandang disabilitas di kabupaten Blora.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan hambatan dalam mengadvokasi organisasi masyarakat sipil.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya strategi Advokasi masyarakat sipil DBM dalam memperjuangkan Perda disabilitas di Kabupaten Blora tahun 2018-2019. Pada mata kuliah studi pemerintahan dan politik gender untuk dijadikan sebagai referensi ataupun literatur kepada mahasiswa Pemikiran Politik Islam.
2. Secara praktis
Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bagi mahasiswa
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua kalangan termasuk kegiatan akademis dalam melihat sebuah fenomena politik secara khusus.
 - b. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi terkait strategi Advokasi masyarakat sipil DBM dalam memperjuangkan perda disabilitas di Kabupaten Blora Tahun 2018-2019. Bagi kepentingan pengembangan program maupun ilmu pengetahuan.
 - c. Bagi Dosen
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan materi kepada mahasiswa terkait mata kuliah studi pemerintahan

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi atau penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar mendapat gambaran dari masing masing

bagian namun saling berhubungan. Sehingga nanti akan terbentuk penelitian yang sistematis serta ilmiah. Dalam proposal skripsi ini terdapat tiga sub bab, berikut sistematika penulisannya:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulis skripsi.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini memaparkan tentang teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yang meliputi uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi strategi Advokasi masyarakat sipil DBM (disabilitas Blora Mustika) dalam memperjuangkan perda disabilitas di Kabupaten Blora Tahun 2018-2019.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan penelitian yang meliputi: upaya strategi advokasi masyarakat sipil DBM (disabilitas Blora Mustika) dalam memperjuangkan perda disabilitas di kabupaten Blora Tahun 2018- 2019, faktor pendukung dan penghambat dalam peran masyarakat sipil DBM (disabilitas Blora mustika) dalam memperjuangkan perda disabilitas di kabupaten Blora Tahun 2018- 2019.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan rangkaian terakhir terdiri dari penulis skripsi yang memuat kesimpulan, saran dan penutup.